

Menakar Kembali Potensi...

Kontribusi Dari Singgih Nugroho

Monday, 29 March 2010

Pemutakhiran Terakhir Monday, 29 March 2010

Menakar Kembali Potensi Toleransi dan Intoleransi Agama di Jawa Tengah Di awal tahun 2010, persoalan kehidupan beragama di Indonesia kembali mendapati tantangan serius. Pasalnya, saat ini terjadi polemik tajam atas proses uji materi di Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama. Hasil uji materi itu diduga akan mewarnai kehidupan keagamaan dan kebangsaan ke depan. Sebelumnya, tiga lembaga yakni The Wahid Institute, Setara Institute, dan CRCS UGM melaporkan kondisi keagamaan di Indonesia tahun 2009 masih diwarnai fakta kekerasan atau pelanggaran kebebasan beragama yang meliputi penodaan/penyesatan agama/keyakinan, serta pendirian dan perusakan tempat ibadah. Pelaku kekerasan diidentifikasi dilakukan oleh aparat negara (meliputi polisi, Departemen Agama, pemerintah, pengadilan, dll); serta aktor masyarakat sipil (meliputi individu, tokoh agama dan ormas keagamaan—Islam).

Dalam bagian laporan itu di Jawa Tengah dicatat terjadi 8 peristiwa kekerasan agama. Laporan itu patut diperhatikan dan juga diharapkan akan membuka kesadaran kita tentang perlunya analisa mendalam sekaligus proses pencarian solusi atas problem tersebut. Berangkat dari alasan itu, tulisan ini ingin mengajak kita untuk menelaah kembali potensi kerjasama dan konflik agama di Jawa Tengah. Kemajemukan dan Tantangannya Dalam catatan BPS tahun 2005, Propinsi Jawa Tengah dihuni oleh sekitar 32 juta jiwa dengan komposisi agama terdiri dari Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Kejawaen. Juga dicatat keragaman etnis meliputi etnis Jawa, Tionghoa, Arab, Sunda dan suku-suku lain. Kemajemukan itu terasa hadir sangat dekat dalam keseharian masyarakat, dimana nyaris tidak ada lagi daerah yang homogen dari identitas agama dan etnis. Varian kultural, tradisi, adat, lingkungan geografi serta demografis semakin menegaskan peta kemajemukan yang nyata di Jateng. Dari segi antropologis, masyarakat Jawa (Tengah) sering dinyatakan sebagai komunitas yang paradog. Di satu sisi dikenal dengan sikap keguyuban untuk rukun, toleran dan terbuka dengan kebudayaan luar, serta tidak suka dengan konflik (terbuka). Tapi di sisi lain dalam praktek sangat mudah ditemui fakta sebaliknya. Sebagian masyarakat tinggal dalam ritme hidup yang terkotak-kotak dalam klasifikasi sosial yang bervariasi, seperti kelas sosial-ekonomi, agama, etnis, budaya, dan politik aliran. Dampak ikutannya adalah munculnya karakter masyarakat yang rentan termodifikasi lingkaran konflik atau kekerasan, baik sebagai pelaku atau korban, dengan aktor negara atau masyarakat sipil. Gambaran suasana paradog itu juga terjadi dalam segi relasi keagamaan antar warga. Sejauh teramati hubungan antar dan sesama pemeluk agama tidak berjalan linear, tapi cukup dinamis dan terkadang mengalami proses involusi (melingkar ke dalam). Ajaran bekerjasama antar warga beda agama pada dasarnya diterima baik oleh sebagian besar tokoh dan umat beragama. Dalam praktek sosial, hal itu bisa disaksikan melalui beragam aktivitas keseharian masyarakat khususnya yang tidak melibatkan unsur agama secara langsung. Belakangan, praktek kerjasama itu sedang ditandai oleh perubahan penentuan batas-batas kerjasama antar pemeluk agama berbeda, bahkan termasuk seagama. Sejauhmana dan mau kemana kerjasama antar umat beda agama itu bisa dilakukan merupakan dua pertanyaan yang sering muncul. Di titik inilah lantas muncul perbedaan mengenai penafsiran batasan kerjasama. Dalam sejumlah kasus, perbedaan itu banyak dipicu oleh kerangka batasan kerjasama yang disodorkan oleh beberapa lembaga keagamaan di tingkat pusat dan diteruskan melalui jejaring keorganisasian. Di lapangan situasi itu telah berkontribusi pada munculnya ketegangan dan bahkan konflik sosial antara warga di aras horizontal. Dalam relasi antar agama, hubungan dinamis kebanyakan terjadi diantara umat Islam dan Kristen (Protestan/Katolik). Terkait dengan ini, polemik pendirian tempat ibadah (utamanya gereja) masih menempati ’rangking’ tertinggi dalam kategori batasan maksimal hubungan kerjasama antar agama di Jateng. Di berbagai tempat sering diberitakan rencana pendirian gereja yang ditunda atau dibatalkan. Bahkan tidak sedikit diantaranya mengalami tindak perusakan oleh sebagian warga masyarakat yang tidak menyetujuinya. Sejauh teramati, ada dua alasan pokok di kalangan penolak yakni pertama, anggapan bahwa tempat ibadah merupakan simbol terpenting bagi identitas formal dan spiritualitas keagamaan sehingga pendirian gereja dimaknai sebagai upaya desakralitas identitas keagamaan. Kedua, anggapan bahwa gereja merupakan pusat penting bagi pendidikan dan penyebaran agama sehingga kehadirannya dianggap akan mengganggu sendi aqidah (keyakinan), atau bahkan akan mendorong proses perpindahan agama. Untuk memperjuangkannya, acapkali para kelompok penentang membungkusnya dengan alasan masalah administrasi formal seperti masalah perijinan dari masyarakat setempat atau relevansinya dengan konteks sosiologis di wilayah terdekat. Dalam sejumlah kasus, alasan kelompok penentang seolah diperkuat oleh dinamika konflik internal kalangan Kristen. Studi kami, kompleksitas kesulitan pendirian gereja tidak selalu datang dari kelompok penentang luar Kristen, tapi justru terkait dengan pengelolaan aliran atau konflik kepentingan di kalangan umat Kristen sendiri. Situasi bertambah rumit, karena umumnya umat Islam tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang anatomi Kristen dan Katolik, keduanya sering dipahami sebagai satu agama saja. Misalnya, keragaman aliran di Protestan dengan segala kekhasannya sehingga secara sosiologis menuntut mereka bergabung atau membangun (banyak) gereja, masih di luar jangkauan pengetahuan mayoritas orang Islam. Cara pandang itu juga dipakai untuk melihat dinamika di satu aliran Protestan yang dipostulatkan sebagai gerakan Kristen secara keseluruhan. Anehnya situasi itu juga terjadi di kalangan yang selama ini mempunyai interaksi tinggi dengan warga beda agama, baik dalam ranah formal maupun informal. Di kalangan masyarakat yang tinggal bertetangga dengan umat beda agama misalnya terkadang dijumpai karakter interaksi yang menisbikan percakapan soal agama. Bagi mereka, agama adalah hal sensitif yang sebaiknya dihindari agar tidak memunculkan degradasi relasi sekaligus dikhawatirkan akan mengganggu kualitas keimanannya. Di tahap selanjutnya hal itu cukup mempengaruhi kualitas

pengetahuan termasuk totalitas penerimaan terhadap pihak di luar agamanya. Di titik ini, sebagian umat Islam membatasi ekspresi baik dalam wujud ucapan atau tindakan yang dipahami akan mengganggu kualitas aqidah mereka. Situasi itu misalnya tampak dari polemik menyampaikan ucapan selamat atau turut merayakan hari besar agama tertentu. Kalangan ini biasanya mendapatkan dukungan dari sebagian tokoh Islam yang berpandangan bahwa tindakan itu merupakan bagian dari batas-batas kerjasama antar umat beda agama. Kemajemukan dan Potensi Kerjasama Menariknya situasi itu diimbangi oleh gerakan masyarakat yang berani mengambil sikap membuka diri dengan batas yang lebih rileks. Bagi mereka soal iman tidak hanya diukur dengan simbol-simbol yang tampak dari luar. Situasi ini misalnya terjadi di satu kawasan di Salatiga yang memiliki tingkat kemajemukan cukup kompleks. Pada kurun tahun 1960-70 an, daerah ini dikenal kawasan pesantren dengan sosok kyai kharismatik yang menjadi simbol perekat umat dari berbagai agama. Seorang warga Kristen menceritakan bahwa dirinya pernah menjadi semacam badal (santri kepercayaan) kyai. Bila ada hajatan di pondok, sang kyai tidak segan meminta tolong kepada warga Kristen yang menyambutnya dengan senang hati. Seiring perjalanan waktu, artefak sejarah toleransi ini seolah terputus. Pasca meninggalnya sang kyai, pesantrennya meredup dan akhirnya tinggal sejarah. Anak-anaknya merantau ke luar daerah dan bangunan pesantren itu diubah dengan satu masjid yang megah. Dalam jangka panjang warga mengalami krisis kepemimpinan (agama Islam) meski mereka sudah berinisiatif mendatangkan para tokoh agama yang bisa menggantikan sosok sang kyai. Pengajian secara rutin diselenggarakan tapi situasi kerohanian dirasa malah berlangsung kebalikannya. Dalam mendidik warga Muslim, sebagian tokoh agama (Islam) menghilangkan ajaran toleransi sang kyai. Pernah ada kasus satu rumah yang dijadikan tempat ibadah satu aliran Kristen digugat dengan alasan tidak memiliki ijin masyarakat setempat. Akibatnya masyarakat pun terbelah dengan ajaran baru ini. Bagi masyarakat yang tidak setuju cerita keguyuban masa lalu dan sosok kyai kembali mendapatkan tempat khusus di memori mereka. Meski tidak ada forum dialog atau sosok yang bisa menjadi jembatan ketegangan itu tapi mereka mencoba mempraktekkan kembali ajaran sang kyai dengan cara yang elegan. Cerita emperik tentang toleransi masyarakat di atas sebenarnya banyak terjadi di berbagai tempat. Dalam satu forum dialog agama, seorang pendeta di Wonogiri bercerita bila pendirian gerejanya justru banyak dibantu para kyai masjid. Dukungan itu ditentukan oleh keberhasilannya dalam membangun relasi sosial dengan para pemuka agama Islam lokal melalui jalinan silaturahmi yang intensif dengan tidak hanya mengacu kepada aturan formal. Testimoni itu menunjukkan bahwa dukungan terhadap toleransi masih dimiliki oleh sebagian besar kalangan pemuka dan umat agama. Tapi acapkali situs itu tertutupi oleh gerakan intoleransi yang datang dari kontestasi politik identitas di aras lebih tinggi. Keberadaan forum-forum dialog agama baik yang diinisiasi oleh pemerintah (daerah) maupun masyarakat sipil yang ada di berbagai daerah di Jawa Tengah seharusnya merupakan modal penting untuk mengelola potensi negatif dari kemajemukan agama. Penting juga organisasi masyarakat sipil bekerjasama secara kritis dengan aparat pemerintahan mengawal proses pendewasaan beragama mereka dan masyarakat luas. Dengan cara ini diharapkan praktek kekerasan keagamaan ke depan Jawa Tengah akan terminimalisir. *) Singgih Nugroho adalah staf Lembaga Percik Salatiga untuk program penelitian keagamaan dan forum dialog agama.